SKRIPSI

ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUB DAS LIAWAN DAS MAMASA DI DESA TADISI

WAHYU SELANG

A0220303

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Selang

NIM : A0220303

Program Studi : Kehutanan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sub DAS Liawan DAS Mamasa di Desa Tadisi" adalah benar merupakan hasil karya saya di bawah arahan dosen pembimbing dan belum pernah di ajukan ke perguruan tinggi manapun serta seluruh sumber manapun yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Majene, 19 Mei 2025

Wahyu Selang
NIM. A0220303

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi	: Analisis peran stakeholder dalam pengelolaan Sub DAS Liawan DAS Mamasa di Desa Tadisi
Nama	: Wahyu Selang
Nim	: A0220303
Program Studi	: Kehutanan
Fakultas	: Pertanian dan Kehutanan

Disetujui Oleh,

Pembimbing I	Pembimbing II
Rusmidin,S.Si,M.Si	Yulsan Demma Semu S.Hut,M.Hut
NIP. 198805192019031009	NIDN. 0021079007

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan	Ketua Program Studi Kehutanan
Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M. Si	Fitri Indhasari, S.Hut.,M.Hut.
NIP. 19600512 198903 1 003	NIP. 198707112019032016

Lulus: 19 Mei 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul :

ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUB DAS LIAWAN DAS MAMASA DI DESA TADISI

Disusun Oleh:

WAHYU SELANG
A0220303

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Pertanian Dan Kehutanan

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Pada Tanggal 19 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

	Tim penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Ritabulan, S.Hut.,M.Si	.....	...../...../.....
2.	Suparjo Razasli Carong, S.Si.,M.Sc	.....	...../...../.....
3.	Muhammad Sarif, S.Hut.,M.Si	.....	...../...../.....

SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING

	Komisi Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rusmidin, S.Si.,M.Si	.....	...../...../.....
2.	Yulsan Demma Semu, S.Hut.,M.Hut	.....	...../...../.....

ABSTRAK

Wahyu Selang (A0220303). Analisis peran stakeholder dalam pengelolaan Sub DAS Liawan DAS Mamasa di Desa Tadisi, di bimbing oleh **RUSMIDIN dan YULSAN DEMMA SEMU.**

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian dari pembangunan wilayah di Indonesia, yang saling terkait dengan konsep ekologi, serta melibatkan hubungan timbal balik antar pelaku dalam sebuah ekosistem. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengentifikasi peran dan apa yang sudah masyarakat rasakan di sub DAS Liawan serta mengetahui kinerja yang dirasakan masyarakat pengelolaan sub DAS. Metode penelitian ini menggunakan analisis stakeholder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata (pengelola) melibatkan berbagai pihak, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemberi rekomendasi kebijakan, penguatan regulasi, konservasi, rehabilitasi, pemberdayaan, edukasi, serta pengawasan; BPDAS Karama sebagai pelaksana kebijakan; KPHL Mamasa Tengah sebagai pengelola langsung di lapangan; Kepala Desa Tadisi sebagai pihak administrasi setempat; serta LSM yang mendukung melalui pemberdayaan, konservasi, rehabilitasi, dan kolaborasi. Akademisi berperan memberikan pengawasan dan penilaian tidak langsung, sedangkan masyarakat berperan melalui klaim dan pemanfaatan lahan. Dari sudut pandang masyarakat, mereka merasakan manfaat ekonomi melalui program perhutanan sosial, bantuan alat dan bibit pertanian, serta pelatihan teknik bertani berkelanjutan. Secara ekologi, pengelolaan yang baik mendukung ketersediaan air yang stabil, sedangkan dari aspek sosial kelembagaan, keberadaan kelompok tani hutan (KTH) mempermudah masyarakat mengakses bantuan teknis dan finansial dari pemerintah.

Kata kunci: Stakeholder, Sub DAS Liawan, konservasi, rehabilitasi

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian dari pembangunan wilayah di Indonesia, yang saling terkait dengan konsep ekologi, serta melibatkan hubungan timbal balik antar pelaku dalam sebuah ekosistem. Pengolaan DAS di Indonesia indentik dengan kompleksitas kewenangan, regulasi, kebijakan dan lintas kedisiplinan keilmuan (Setyo, 2023).

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik didalam negeri maupun oleh dunia internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bencana alam yang dirasakan, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan semakin meningkat, sehingga perlu adanya pengolaan DAS secara terpadu yang harus melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholder)* pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari berbagai unsur seperti masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah Desa dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelengaraan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pengelolaan daerah aliran sungai yang tepat akan meningkatkan daya dukung dan produktivitas lahan, daya tampung lingkungan hidup daerah aliran sungai, menjamin ketersediaan air, baik dalam jumlah, kualitas dan distribusi ketersediaan sepanjang tahun bagi berbagai keperluan masyarakat dan pembangunan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dihadapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal.

Kondisi ekosistem sub DAS Liawan merupakan salah satu isu dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan salah satu variabel terjadinya banjir adalah kondisi sub DAS yang kritis. Pentingnya sub

DAS sebagai satu unit perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang telah diterima oleh berbagai pihak baik ditingkat nasional maupun tingkat regional yang

Kesatuan ekosistem yang mencakup hubungan timbal balik sumberdaya alam dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia guna untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. DAS bagian hulu cenderung memiliki tingkat kerawanan akan terjadinya kekritisan lahan, mengingat wilayah yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 8% yang cenderung miring hingga curam akan memungkinkan terjadinya erosi dan menurunkan tingkat kesuburan tanah kerena material unsur hara yang hilang oleh air.

DAS Liawan memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi terutama di bagian hulu yang berada di lereng gunung Sumarorong seperti wisata air terjun. DAS Liawan memiliki kemiringan lereng yang curam namun disana terdapat kegiatan pertanian dan perkebunan yang kurang memperhatikan aspek konservasi lahan dan kaidah pengelolaan, hal tersebut menyebabkan rusaknya struktur tanah oleh erosi selain itu lahan menjadi kritis karena telah kehilangan unsur-unsur hara dan kandungan tanah untuk tumbuhnya tanaman.

Ritabulan (2015) dalam penelitiannya mengenai pemanfaatan hutan mangrove di Batu Ampar, Kalimantan Barat, menunjukkan pentingnya pemetaan stakeholder untuk mengetahui posisi, kepentingan, serta kekuatan pengaruh masing-masing pihak dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks Sub DAS Liawan untuk mengidentifikasi stakeholder yang harus diperkuat kapasitasnya maupun yang perlu diajak berkolaborasi lebih intensif. Dengan pemetaan yang tepat, strategi pelibatan stakeholder dapat diformulasikan agar mendukung keberhasilan program pengelolaan DAS berbasis partisipasi.

Wilayah DAS Liawan Desa Tadisi merupakan daerah yang subur dengan pemandangan yang menarik, keberlimpahan sumberdaya air seperti banyak ditemukan sumber air bersih yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Desa Tadisi dan sekitarnya. Potensi besar yang ada pada DAS Liawan menyebkan tekanan yang besar pada penggunaan lahan. Maraknya perambahan hutan untuk kegiatan pertanian, pembangunan rumah pada lereng-lereng terjal, dan perubahan penggunaan lahan kawasan non terbangun menjadi terbangun, selain itu daya tarik lokasi wisata air terjun juga mendorong bagi penyedia jasa untuk menyiapkan villa, atau gazebo untuk para pengunjung serta jalan yang telah dibangun pemerintah di kawasan Desa Tadisi Kecamatan Sumarorong, Selain itu ada potensi diwilayah ini terjadi bencana seperti banjir.

Upaya konservasi bisa dilakukan dengan kerja sama antara stakeholder dan masyarakat untuk menyelamatkan kondisi DAS Liawan yang semakin terancam. Peran stakeholder sangat penting dalam upaya menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di sub DAS Liawan karena stakeholder merupakan pihak yang mengeluarkan kebijakan. kebijakan yang benar dalam pengelolaan DAS akan memberikan hasil yang besar terhadap pemulihan ekosistem dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait analisis peran stakeholder dalam pengelolaan DAS Liawan. Hal ini perlu dilakukan untuk dijadikan bahan informasi dalam peningkatan kesejateraan masyarakat dan penerapan kebijakan secara optimal dalam pengelolaan sub DAS Liawan.

1.1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran stakeholder dalam pengelolaan sub DAS Liawan?
2. Bagaimana kinerja stakehorder yang dirasakan masyarakat dalam pengolaan sub DAS Liawan?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengentifikasi peran dan apa yang sudah masyarakat dirasakan di sub DAS Liawan.
2. Untuk mengetahui kinerja yang dirasakan masyarakat dalam pengelolaan sub DAS.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Agar masyarakat dapat mengetahui peran stakeholder dalam pengelolaan DAS Liawan.
2. Peneliti selanjutnya, mendapatkan data mengenai peran stakeholder dalam pengelolaan DAS Liawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. DAS (Daerah Aliran Sungai)

Pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS juga dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama (Danial,2020).

Kegiatan pelestarian ekosistem hutan dan DAS memerlukan pelibatan banyak pihak, meliputi masyarakat hulu (pihak penyedia air), masyarakat hilir (pihak pengguna air) dan pemerintah sebagai operator dan regulator sumberdaya air. Memberikan tanggung jawab sepenuhnya hanya kepada masyarakat hulu dalam kegiatan konservasi ekosistem DAS merupakan bentuk ketidakadilan karena konservasi DAS juga memberi manfaat keberlanjutan ketersediaan air bagi masyarakat hilir. Pihak pengguna air di daerah hilir perlu berkontribusi terhadap masyarakat hulu yang telah berjasa dalam menjaga ekosistem DAS dari ancaman degradasi. Terciptanya mekanisme kontribusi ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam upaya konservasi DAS di daerah hulu. Sebelum instrumen kebijakan tersusun maka penting untuk diketahui bagaimanakah persepsi dan perilaku masyarakat hulu, hilir dan pemerintah dalam memahami fungsi ekosistem DAS dan pengelolaannya (Supangat, 2020).

2.2. Hakekat Das Sebagai Dasar Dalam Pengelolaannya

Pada dasarnya DAS merupakan satu kesatuan hidrologi. DAS penampung air, mendistribusikan air yang tertampung lewat suatu sistem

saluran dari hulu ke hilir, dan berakhir di suatu tubuh air berupa danau atau laut.

Barsama dengan atmosfir dan laut (atau danau), DAS menjadi tempat kelangsungan daur hidrologi. Hubungan hidrologi antara atmosfir dan tubuh air bumi dapat berjalan secara langsung, atau lewat peranan DAS. Terjadi pula hubungan hidrologi lansung antara DAS dan atmosfir (Zahrul, 2018).

Selaku suatu wilayah kegiatan pendauran air maka DAS merupakan suatu satuan fisik yang cocok bagi penelaahan proses-proses yang menen tukan pembentukan bentang lahan (landscape) khas di berbagai wilayah bumi. Prosesproses yang berlangsung di dalam DAS dapat dikaji berdasar pertukaran bahan dan energi (Leopold dkk, 1964). Setiap DAS cenderung memperluas diri, baik dengan jalan erosi mundur dan/atau menyamping di daerah hulu, maupun dengan jalan pengendapan di daerah hilir, termasuk pembentukan jalur berkelok (meander) di dataran pantai dan pembentukan delta di depan kuala. Dilihat dari segi ini maka DAS merupakan suatu satuan geomorfologi yang bersifat sangat dinamik, dibentuk oleh proses- proses fluvial dan memperoleh corak dan cirinya dari paduan dua proses yang saling berlawanan. Proses yang satu ialah degradasi (penurunan) di daerah hulu dan proses yang lain ialah agradasi (peningkatan) di daerah hilir. Dengan demikian ada proses perpindahan material dari hulu ke hilir. Salah satu hasil morfogenesa penting semacam ini adalah pembentukan bentang tanah atau pola agihan tanah yang khas di tiap-tiap DAS. Keadaan ini merupakan dasar ketiga dalam pengelolaan DAS (Zahrul, 2018)

Dari dasar pengelolaan pertama dan kedua mengandung suatu pengertian penting, bahwa DAS merupakan suatu sistem yang terbuka (open system). Hal ini dapat dilihat dari berfungsinya interaksi luar (functioning of external interactions), yang menurut DeSanto (1978) merupakan kategori kedua yang membentuk hakekat kehadiran suatu sistem. Dasar pengelolaan kedua, ketiga dan keempat menunjuk kepada suatu pengertian penting berikutnya, bahwa DAS merupakan suatu sistem peubah energi (energy transformer). Hal ini dapat dipandang adanya interaksi berfungsinya faktor-faktor internal (functioning of

internal interactions). Yang menurut (De Santo 1978) merupakan kategori pertama yang membentuk hakekat kehadiran suatu sistem (Zahrul, 2018).

2.3. Dasar-Dasar Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS biasanya mengacu pada pengelolaan dua anasirnya (component) yang dianggap terpenting, yaitu sumberdaya tanah dan air. Adapun analisir yang lain, seperti iklim, vegetasi, relief dan manusia, diperlukan sebagai faktor-faktor dalam pengelolaan (Zahrul,2018).

Maksud pengelolaan DAS ialah mendapatkan manfaat lengkap yang sebaik baiknya dari DAS sesuai dengan kemampuanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan yang berkembang menurut waktu. Dalam ungkapan "sesuai dengan kemampuannya" tersirat pengertian selaras dan lestari. Ungkapan "manfaat lengkap" dan "kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan yang berkembang menurut waktu" mengisyaratkan bahwa (1) hasil keluaran DAS tidak boleh hanya bermacam tunggal, akan tetapi harus terdiri atas berbagai hasil keluaran yang berkombinasi secara optimum, dan (2) rencana pengelolaan harus bersifat lentur (flexible) yang berisi sejumlah alternatif (Zahrul, 2018).

Dalam rencana pengelolaannya, DAS dibagi menjadi dua satuan pengelolaan. Satuan pengelolaan hulu mencakup seluruh daerah tadah atau daerah kepala sungai. Satuan pengelolaan hilir mencakup seluruh daerah penyaluran air atau daerah bawahan. Oleh Ray dan Arora (1973) istilah "watershed" digunakan secara terbatas untuk menamai daerah tadah, sedang daerah bawahan mereka namakan dengan istilah "commanded area". Yang dinamakan "commended area" ialah daerah-daerah yang secara potensial berpengairan. Di DAS yang dapat dibangun suatu bendungan atau waduk maka seluruh daerah yang terkuasai oleh bangunan tersebut (daerah yang terletak dibawah garis tinggi pintu bendungan atau waduk) merupakan "commended area".

Pengelolaan daerah tadah ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1) Pengendalian aliran permukaan tanah *(excess*) yang merusak, sebagai usaha mengendalikan banjir,

2) Memperlancar infiltrasi air kedalam tanah.
3) Mengusahakan pemanfaatan aliran permukaan untuk maksud-maksud yang berguna,
4) Mengusahakan semua sumberdaya tanah dan air untuk memaksimumkan produksi.

Faktor-faktor yang berdaya (*affect*) atas program pengelolaan daerah tadahan atau DAS hulu ialah:

1) Bentuk dan luas daerah tadahan,
2) Lereng dan timbulan makro
3) Keadaan tanah, termasuk fisiografi dan hidrologi tanah,
4) Intensitas, jangka waktu dan agihan curah hujan
5) Rupa dan mutu vegetasi penutup,
6) Penggunaan lahan terkini.

1.4 Sumber Daya Hutan

Sumberdaya hutan indonesia yang berfungsi sebagai sumberdaya alam dan lingkungan dihup telah mempunyai peranan sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sumberdaya hutan juga telah melindungi puluhan Daerah aliran sungai dari bahaya banjir,kekeringan, erosi dan sedimentasi. Namun dilain pihak, kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan cenderung semakin menurun. Hal ini antara lain karena penebanagan hutan yang berlebihan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan perladangan berpisah. Penurunan kualitas dan kuantitas hutan cenderung meningkat. Sementara kegiatan-kegiatan rehabilitas sumberdaya hutan, seperti reboisasi, pengendalian kebakaran hutan, masih belum memadai dibanding dengan laju kerusakan yang terjadi.Dengan memperhatikan fungsin ekonomi dan ekologi, kondisi dan upaya yang telah dikembangkan, maka perlu disusun perencanaan pengelolaan hutan yang terarah, terinci dan terpadu (Sudaryono, 2017).

Sumberdaya alam dalam kawasan DAS difokuskan pada praktik- praktif penggunaan sumber daya tanah, air dan vegetasi hutan yang juga terkait dengan aktivitas manusia yang tinggal di dalamnya. Praktik-praktik penggunaan lahan yang sangat besar, sebagaimana yang terjadi di berbagai wilayah sehingga mengakibatkan degradasi lahan di

wilayah DAS bersangkutan (Eckhlom, 1978). Erosi di suatu tempat akan mengakibatkan terjadinya pengendapan atau sedimentasi di tempat lain. Sedimen yang dihasilkan dengan cepat mengisi sistem aliran sungai dan danau atau wuduk, sehingga dapat mengurangi umur efektif wuduk sehingga fungsinya seperti irigasi, pengendali banjir, produksi tenaga listrik, tidak dapat terpenuhi (Supayogo, 2017).

Pada dasarnya pengelolaan hutan harus mencakup aspek pemanfaatan, pelestarian dan penelitian yang dikembangkan melalui kegiatan- kegiatan:

- Peningkatan kegiatan reboisasi.
- Peningkatan pembinaan HPH.
- Peningkatan kegiatan pengendalian perladangan berpindah.
- Pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan.
- Peningkatan pembangunan hutan tanaman industri.
- Pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai.
- Peningkatan penelitian keanekaragaman hayati.

Peranan hutan dalam mengatur aliran sungai telah lama menjadi perhatian dan perdebatan para ahli terutama setelah terjadinya Revolusi perancis tahun 1978. Tanggapan awal para ahli kehutanan Amerika terhadap peranan hutan dalam mengatur aliran sungai dimulai tahun 1905 seperti dikemukakan berdasarkan pendapat Giffrd pinchot, bahwa hutan mampu mengatur aliran sungai, tetapi pengaruh hutan terhadap aliran sungai menjadi sangat penting hanya pada konsidi tutupan hutan melingkupi sebagian besar DAS (Hutagaol, 2019).

1.5 Sumberdaya Lahan

Lahan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sekaligus merupakan media lingkungan untuk memproduksi pangan, perumahan, dan lain-lain. Pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya kegiatan pembangunan telah berakibat terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan di indonesia. Sering di jumpai pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan tersebut, sehingga timbul berbagai masalah, seperti terjadinya jutaan lahan kritis, hilangnya lahan subur, dan terjadinya pencemaran tanah (Sudaryono,2022).

Degradasi lahan tersebut terjadi karena peruntura lahan/tanah yang kurang tepat, sebagai akibat pelaksanaan yang tidak memperhatikan kaidah penetapan ruang dan kriteria kemampuan serta kesesuaian lahan. Guna menjamin pemanfaatan yang lestari, lahan harus dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek konservasi dan pemanfaatannya.

Pemanfaatan sumberdaya lahan dilakukan dengan mempertimbangkan:

1.5.1 Fungsi lokasi lahan dalam tatanan lingkungan berdasarkan karakteristik tanah, lahan dan wilayah.

1.5.2 Cara-cara pemanfatan yang memperhitungkan kaidah konservasi.

1.5.3 Pemanfaatannnya disesuikan dengan tata ruang.

1.5.4 Kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia.

1.5.5 Peran serta masyarakat secara luas.

Vegetasi dan lapisan serasah melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung tetesan air hujan yang dapat menghancurkan agregat tanah, sehingga terjadi pemadatan tanah. Hancurkan partikel tanah dapat menyebabkan penyumpanan pori tanah makro sehingga menghambat infilrasi air tahah, akibatnya limpasan permukaan tanah sangat dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap pelapukan seresah berkualitas tinggi mengandung hara, terutama tinggi akan mudah melapuk sehingga fungsi penutupan permukaan tanah tidak bertahan lama (Suprayogi, 2014).

1.6 Sumberdaya Air

Pesatnya perkembangan indutri dan peningkatan jumlah penduduk telah memacu penggunaan air, baik berupa air tanah maupun air permukaan. Hal ini merupakan ancaman bagi ketersediaan air maupun kualitas air dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air yang berasal dari air permukaan akan meningkat pula. Kebutuhan air untuk irigasi dari tahun ke tahun juga bertambah, demikian pula kebutuhan air untuk industri diperkirakan akan mengalami peningkatan pula (Sudaryono,2022).

Kondisi kekritisan sumber air keadaannya sudah mulai tampak

dari sekarang, dimana beberapa daerah perkotaan kekurangan air untuk industri terutama pada musim kemarau.

1.6.1 Keterpaduan pengelolaan sumberdaya air permukaan dan air bawah tanah serta kemungkinan pemanfaatan air.

1.6.2 Pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara terpadu dalam pemanfaatannya melalui penataan ruang wilayah.

Prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya air adalah secara terintegrasi, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:

1.6.2.1 kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten\kota;

1.6.2.2 wilayah sungai dan cekungan air yang ditetapkan dan

1.6.2.3 pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai yang berkait dengan daerah pengaliran sungai (Andawayanti, 2019).

1.7 Sumberdaya Manusia

Dalam pengertian sehari-hari, SDM lebih dikenal sebagai bagian dari integral suatu sistem yang membentuk organisasi. Oleh karena itu, keberadaan SDM menjadi kunsi okok yang menentukan bagaimana nasib kehidupan manusia itu aendiri, lebih-lebih ketika mereka berada dalam suatu organisasi maupaun lembaga. Mereka menjadi mesin penggerak dalam mengelola dan menjalankan semua bentuk aktifitas yang mendukung kemajuan organisasi merek. Bahkan saat ini, posisi manusia sumber daya belaka, tetapi juga aset utama dan yang memiliki nilai, yang dapat dilipatganda serta dikembangkan demi suatu kemajuan. Inilah yang kemudian muncul istilah human capital. Manusia sebagai modal utama yang menentukan keberlangsungan hidup, karena mereka memilki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman (Syafruddin, 2022).

Untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan, khususnya untuk mengentaskan petani dari perangkap kemiskinan, perlu dilakukan pelestarian fungsi sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, seperti kawasan hutan, daerah penggalian tambang, dan lain-

lain. Pelestarian fungsi tersebut harus disertai dengan penciptaan iklim yang sehat dan kondusif dengan memberikan kemudahan dan akses yang adil dan merata bagi kelompok miskin untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. (Sudaryono, 2022).

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi akan mempuyai implikasi terhadap kebutuhan sumberdaya lahan, baik untuk pemukiman, pendidikan, tempat berusaha,atau untuk kepentingan lainnya. Padahal sumberdaya lahan sangat terbatas, membuka hutan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan berarti bencana.

Strategi pengelolaan masyarakat, antara lain

1.7.1 Pengembangan peranserta masyarakat.

1.7.2 Pengembangan kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

1.7.3 Peningkatan dan pengembangan peran wanita; strateg.

1.8 *Stakeholders* Pengelolaan DAS

Hasil analisis *stakeholders* yang dilakukan melalui identifikasi sistematis para pemangku kepentingan, dan melakuka, penilaian, perbandingan kepentingan peran, dan kekuasaan melalui tahapan; identifikasi *stakeholders* dan klafikasi *stakeholders,* di peroleh hasil sebagai berikut; *staholders* pengelolaan DAS Liawan kecamatan sumarorong dari hulu dan hilir adalah multi *staholders,* dari pemerintah pusat tersendiri dari; balai pengelolaan DAS (BPDAS) liawan kecamatan sumarorong dan balai wilayah (BWS) mamasa yang bertanggungjawab terhadap pengelolan DAS dan sumberdaya air. Sementara di tingkat provinsi terdiri atas; bappeda, DLHK, KPH I, dinas pengairan, dinas PUPR, Distanbun, dan badab penanggulan bencanan yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai tupoksinya,. Kemudiaan pemerin tah kabupaten/ kota terdiri dari; dinas PURP, dan dinas lingkungan hidup. Juga sesuai tupok sinya, serta dari luar pemerintah yakni dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan beberapa kelompok dan forum masyarakat (Mulyawan,2022).

Lantaeda *et al.,* (2017) mendefinisikan peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia

melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

1.9 Identifikasi Dan Klasifikasi Stakeholder

Pengelolaan DAS liawan kecamatan sumarorong melibatkan banyak pihak/stakeholder. Masing-masing pihak/stakeholder tersebut mempunyai peran dan kepentingan yang berbeda-beda terkait pengelolaan DAS liawan kecamatan sumarorong. Peranan dan kepentingan *stakeholder* tergantung pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk mengetahui *stakeholder* saja yang terlibat, berperan dan berkepentingan terhadap pengelolaan DAS liawan kecamatan sumarorong perlu dilakukan identifikasi para pihak serta menganalisa tugas pokok masing-masing stakeholder tersebut. Secara gari besar stakeholder dapat digolongkan ke dalam stakeholder dari unsur instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan LSM/organisasi non pemerintah. Sedangkan dari unsur pemerintah dibedakan dari unsur pemerintah kabupaten mamasa (Susatyo,2015).

Dalam identifikasi dan hasil klasifikasi diatas, terdapat 3 stakeholder primer, dan 3 stakeholder tersier. Kategori Stakeholder Primer (Utama): yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah para pihak yang tergantung pada sumber daya (resauces) atau jasa (service) yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pengelolaan DAS atau yang paling banyak menerima dampak/manfaat dari program pengelolaan DAS. Kategori Tersier: adalah para pihak yang tidak terlibat atau terpengaruh langsung dalam pelaksanaan program pengelolaan DAS tetapi dapat mempengaruhi pihak lain dalam pengelolaan DAS yang dilaksanakan.

1.9.1 Analisis Peran, Kepentingan Dan Pengaruh Stakeholder

peranan dan fungsinya dalam pengelolaan DAS liawan kecamatan sumarorong , secara garis stakeholder tersebut bisa di bedakan menjadi 2, yaitu peran dan fungsi informal maupun formal. Peran dan fungsi informasi terdir atas para pihak yang terlibat dalam penggunaan

ruang dan sumberdaya alam dalam wilayah DAS, sedangkan peran fungsi formal dalam hal ini pemerintah. Kelompok formal yang diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) selama ini dikenal dalam bentuk Kementerian, Balai dan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) Propinsi dan Kabupaten/Kota. Semenjak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, secara ringkas pembagian urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3, antara lain:

1. Urusan pemerintahan absolute, merupakan urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.
2. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sendiri dibedakan menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial), dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja; pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistic; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan). Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan

dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi (Marsona ,2015)

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewenangan pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 baru saja diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 dan pedoman/petunjuk/peraturan pelaksananya belum ada, maka untuk analisis peran stakeholder pengelolaan DAS liawan kecamatan sumarorong berkelanjutan masih berpedoman pada PP Nomor 38 Tahun 2007.

1.10 Penelitian terdahulu

Penelitan ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 reperensi jurnal penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	hasil
1	Rikky Mulyawan , dkk. 2020	Kajian peran stakeholder pada implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu, studi kasus DAS krueng Aceh	Untuk menganalisis kondisi biofisik DAS krueng aceh dan menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan DAS krueng aceh, menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan DAS.	Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakam data primer yang diperoleh dari pengamatan (*observasi)*, *indepht interview* dan data sekunder dari studi literatur.	Hasil pengamatan perubahan tutupan lahan Pada DAS krueng aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukan bahwa setiap Tahun terjadi perubahan akibat dari perambahan dan alih fungsi penggunaan lahan, perubahan yang sangat sugnifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu pengurangan luas pada tahun lahan kering sekunder, lahan pertanian kering, sawah,tambak, dan penambahan luas pada tanah terbukan dan pemukiman

2.	Adhyasta firdaus,dkk 2024	Kajian peran *stakeholder* dalam pengelolaan sub DAS Ciwidey Kabupaten bandung	Untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan sub- DAS ciwidey kabupaten bandung, memetakan hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan sub-DAS ciwidey kabupaten bandung.	Penelitian menggunakan metode teknik analisas MACTOR dan deskriptif kualitatif, dengan mengunaka n pendekatan *mix methode.*	Hasil analisa yang dilakukan kendala yang ada dalam pengelolaan sub-DAS ciwidey kabupaten banung mencakup masalah kerjasama antar instansi yang kurang efektif, adanya alih fungsi lahan yang menguragi resapan air, peran pengusaham wisata yang masih kurang rerhadap pengelolaan sungai, pemberdaya ekonomi masyarakat
3.	Dian Roshanti,dk k. 2022	Analisis peran aktor dalam fomalitas kebijakan pogram sekardadu (sekolah rawat daerah aliran sungai di banyuwangi	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran aktor dalam formulasi kebijakan program SEKARDADU (sekolah rawat daerah aliran sungai di banyuwangi).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara diskriptif eksploratif melalui wawacara mendalam dan analisis dokumen.	Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu lebih dibuat terjadwal sehingga masing-masing aktor yang berperan bisa melaporkan progres kegiatannya sehingga kegiatan SEKARDADU ini bisa terimplementasi dengan baik.

4.	Ritabulan, dk k. 2024	Status keberlanjutan pengelolaan DAS mandar di sulawesi barat, indonesia	Mengukur status keberlanjutan DAS mandar,dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan DAS mandar.	Atribut pada masing-masing dimensi dikumpulkan melalui wawacara dengan pakar dan studi literatur (data primer dan sekunder).	Status berkelanjutan pengelolaan DAS mandar pada dimensi ekologi dan ekonomi berada pada kategori cukup berkelanjutan, pada dimensi Sosial dan kelembangaan berada pada kategori kurang berkelanjutan. Sementara pada dimensi teknologi, pengelolaan DAS mandar bagian hulu dan tengah termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan.
5.	Reski lestari,dkk. 2014	Peran pemerintah daerah provinsi riau dalam pengelolaan DAS siak:studi kasusdaerah aliran sungai hilir daerah aliran sungai siak tahun 2010-2013	Untuk menganalisa peran pemerintah daerah provinsin riau dalam pengelolaan bagian hilir DAS siak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang penyajiannyas ecara deskriptif.	Peran pemerintah daerah provinsi riau dalam pengelolaan DAS siak berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari masing-masing instansi pemerintah daerah provinsi/ kabupaten /kota terkait di wilayah DAS.

DAFTAR PUSTAKA

Alviya, E. Yosefi S. R., Maryani, & Muttaqin, Z. 2016. Meningkatkan peran pemangku kepentingan Dalam pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.* Vol. 13, No. 2; Hal. 121-134.

Andawayanti, U. 2019.*Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terintegrasi.*
Malang:UB Press.

Andi Setyo Pambudi, 2023. Strategi Optimalisasi DAS Terpadu di Indonesia melalui kolaborasi pembangunan Pusat dan Daerah.Jakarta Selatan. *Jurnal Pembangunan negeri. Vol.* 8, No. 2; Hal. 418-421.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Data Profil Desa Tadisi Tahun 2024*. Mamasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa.

Danial, M. 2020. Strategi Pengelolaan Hulu Daerah Aliran Sungai Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan: Strategy Management The Upstream Of Jeneberang Watershed In South Sulawesi Province. *Jurnal Ecosolum*, Vol. 9, No. 2; Hal. 11-31.

Djoko, M. Susantyo, O, M., Kusumandari, A., & Supriyanto, N. 2017. Identifikasi dan analisis peran stakeholder pengelolaan sub das ngrancah berkelanjutan (Studi Kasus Di Sub Das Ngrancah – Kabupaten kulonprogo*). (skripsi)*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Hutagaol, R.R. 2019. *Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.*
Yogyakarta. Penerbit Deepublish.

Junengsih *et al.,* 2017. Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Das Citarum Dan Limbah Industri. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan.* Vol. 4 No. 2; Hal. 45-58.

Kartodiharjo, H, 2017. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Diskursus Politik Aktor Jaringan. Bogor, *Jurnal Sajogyo Institute.* Vol. 9, No. 10; Hal. 23-35.

Lantaeda *et al.,* 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik.* Vol. 04 No. 048; Hal. 101-114.

Mulyawan, R. Wahjunie, D,E. Ichwandi, L .& Tarigan,D, S., 2022. Kajian Peran Stakeholder Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh.. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 20, No. 2; Hal. 198-209.

Nopyandri, 2014. Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 5, No. 2; Hal. 45-59.

Ritabulan., Basuni, S., Santoso, N., & Bismark, M. (2015). Stakeholders mapping of utilization of mangrove forest: Case of mangrove utilization as raw material for charcoal by community in Batu Ampar, Kubu Raya District, West Kalimantan Province. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, *24*(4), 348–359.

Reed, & Mark S., 2009. Natural Resource Managemant. *Journal of enviroment management*. Vol. 9, No. 2; Hal. 1933-1949.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono.2022. *Metode penelitian kuantitastif, kualitatif dan R&D*.Bandung. Alvabeta.

Suprayogi,S., Pumama.S. L. & Darmanto. D. 2014. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.* Yogyakarta: Gadjah Mada Universitty.

Suprayogo, D., Widianto, Hairiah, k. & Nita,I. 2017. *Manajemen Daeran Aliran Sungai (DAS).* Universitas Brawijaya Press. Indonesia.

Supangat, A. B., Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Purwanto, P., & Donie, S. 2020. Membangun proses perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai mikro secara partisipatif: sebuah pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Vol. 4. No. 1; Hal. 17-36.

Suharto, E. P. 2012 . *Analisis Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung

Suryani, N. 2018. *Geografi Sosial: Interaksi Manusia dan Lingkungan*. Yogyakarta: Ombak.

Syafruddin, Periansya,Farida, A, E., Tawaf, N., Palupi, H, F., Butarbuta, A, J, D.,& Satriadi, 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Batam: CV.Media Grafika.

Zahrul, F. & Azizah, C. 2018. Tinjauan Daerah Aliran Sungai Sebagai Sistem Ekologi Dan Manajemen Daerah Aliran Sungai. *Skripsi.* Universitas Asmus Muslim Aceh.